

Pasukan Elite Yudha Sakti Hancurkan Markas KKB

JAKARTA (IM) - Pasukan elite dari Satuan Tugas Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti, meluluhlantakan markas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap IV/Sorong Raya, pimpinan Manfred Fatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maybrat - Papua Barat Daya.

Pasukan yang diterjunkan ke rimba Papua terdiri dari dua tim Mobile Sakti pimpinan Sertu Dega Jandri Folland dan Serda Dimas Nuhali Pardosi. Mereka berhasil menguasai dan menduduki markas KKB teroris setelah beberapa hari melaksanakan patroli dan ambush (penyergapan).

Penguasaan terhadap markas KKB itu terjadi setelah seminggu melakukan pencarian terhitung sejak 21 Januari 2024.

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa mengatakan, dalam penyergapan tersebut,

tidak ditemukan anggota KKB.

"Markas KSTP kodap IV /Sorong Raya di Maybrat pimpinan Manfred Fatem telah dikuasai dan dihancurkan TNI, namun saat penyerangan keburu ditinggalkan, seperti informasi bocor dan diketahui KSTP sebelum TNI mendekati ke Markas tersebut," ujar Suriastawa kepada Okezone, Selasa (30/1).

Dikatakannya, anggota TNI yang diterjunkan ke lokasi berhasil menyita beberapa barang bukti yang yakni Bendera Bintang Kejora, 6 butir Amunisi Kaliber 5,56 mm, 1 buah Teleskop, termasuk 1 buah Solar Cell.

Pasukan TNI juga mengakankan sejumlah senter, 2 lembar kartu KIS, 3 buah charger HP, 1 buah lensa kamera, 1 buah HP, beberapa busur berikut anak panahnya, bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. ● han

Ganjar Pranowo: Tata Kelola Transportasi di Indonesia Timur Harus Dirintis BUMN



FOTO: ANT

SILATURAHIM MAHFUD MD DI PONPES BABAKAN CIWARINGIN

Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) berbincang dengan pengurus ponpes dan ulama di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Kab. Cirebon, Jabar, Selasa (30/1). Dalam silaturahmi bersama ulama pondok pesantren tersebut Mahfud MD berpesan agar semua ikut menjaga NKRI dan membina negara dengan nilai-nilai Islami dan punya akhlak yang kuat sehingga tidak ikut merusak dengan perbuatan korupsi.

BANDA NEIRA (IM) - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengakui bahwa sistem transportasi di Indonesia bagian timur, khususnya di Kepulauan Maluku, masih jauh dari ideal. Banyak pulau tersebut di kawasan tersebut, namun aksesibilitas antarpulau masih sulit dan mahal lantaran keterbatasan armada.

Ganjar menilai, pembangunan tata kelola transportasi di Indonesia bagian timur perlu diperhatikan lebih jauh oleh pemerintah pusat.

Pemerintah Pusat, jangan menyerahkan sepenuhnya urusan tata kelola transportasi kepada kepala daerah atau mekanisme pasar.

"Tata kelolanya mesti asimetris ya, otonomi daerahnya mesti asimetris, sehingga jangan disamakan seluruh potensi yang ada ini berlaku aturan yang sama, karena cirinya berbeda-beda," katanya dalam lawatannya ke Banda Neira, Maluku, Selasa (30/1).

Ganjar mengakui, Indonesia saat ini masih berfokus pada sistem transportasi umum berbasis darat, baik bus atau kereta. Padahal, negara kepulauan seperti Indonesia seharusnya berfokus pada transportasi laut dan udara.

Dua hal ini masih menjadi masalah di Maluku. Dari Ambon ke Banda Neira saja, misalnya, setiap hari terdapat pelayaran dari kapal milik negara. Sementara itu, penerbangan amat jarang, harganya mahal, serta begitu terbatas kapasitas angkutnya.

Ganjar menyebut bahwa

transportasi dari Ambon ke Maluku Barat Daya, yang lebih dekat ke Timor Leste, keadaannya lebih buruk lagi. Ia banyak menerima keluhan dari masyarakat selama kunjungannya ke Ambon dalam dua hari belakangan.

Kalau perlu, kata Ganjar, jumlah puskesmas terapung diperbanyak untuk setiap kawasan kepulauan.

"Pak Ganjar, penerbangan dulu cukup banyak sehingga wisatawan masuk tapi hari ini tidak. Bisa enggak dikembalikan? Maka orang akan datang ke sini dengan fasilitas transportasi yang lebih baik." Barangkali karena ini bercirikan kepulauan, maka pembangunannya ya ocean based oriented," kata Ganjar mengutip keluhan warga kepedaannya.

"Itulah pentingnya membuat perlakuan khusus atau special treatment untuk daerah-daerah ini dengan afirmasi-afirmasi," lanjut Ganjar. Ia meyakini, dalam kondisi yang belum terbangun dengan baik, swasta akan gamang untuk berinvestasi membangun tata kelola transportasi laut yang terjangkau.

"State entity business atau BUMN harus dipakai untuk pioneering. Jadi apa? Kapal Pelnit ditambah, atau penerbangan perintis masuk dulu sampai kemudian bagus, negara pelan-pelan keluar terus kemudian swasta boleh masuk," katanya.

"Atau kemudian ya berkolaborasi (dengan swasta) atau berkompetisi juga boleh. Itu yang mesti dilakukan dengan potensi yang secepat ini," ujar Ganjar. ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



DIALOG GIBRAN DENGAN PELAKU PERUSAHAAN RINTISAN DIGITAL DAN UMKM

Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (keempat kanan) didampingi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo - Gibran Jawa Barat Ridwan Kamil (ketiga kanan) berdialog dengan pelaku usaha rintisan digital di Bandung, Jabar, Selasa (30/1). Dalam kunjungan tersebut Gibran berdiskusi dan menyerap aspirasi pelaku usaha rintisan digital dan pelaku UMKM ekonomi kreatif.

DPR Sepi Agenda Rapat, Wakil Rakyat Sibuk Urusan Politik Pribadi dan Partai

DPR seharusnya menggunakan masa sidang untuk membahas nasib rakyat, bukan sibuk kampanye untuk urusan politik pribadi dan partai politik.

JAKARTA (IM) - Kegiatan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Senayan, terlihat sepi. Para anggota dewan tampaknya tidak memiliki kegiatan terkait legislasi di tengah masa kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Seperti diketahui, masa kampanye dimulai sejak 28 November 2023 hingga 10

Februari 2024. Sebelumnya, DPR selalu menyampaikan jadwal agenda rapat setiap harinya kepada wartawan. Jadwal ini pun bisa diakses publik melalui situs resmi DPR. Namun, sudah dua minggu ini tidak ada jadwal agenda yang diberikan DPR kepada para wartawan.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indone-

sia (Formappi), Lucius Karus menilai kosongnya DPR di masa kampanye, sungguh memalukan.

"Ini memalukan sih sesungguhnya. DPR yang seharusnya menggunakan masa sidang untuk bersidang malah memanfaatkannya untuk kampanye. Lebih memalukan lagi karena mereka pasti tak akan jujur mengatakan kepada rakyat kalau mereka semua sedang membolos dari ruang sidang," kata Lucius kepada wartawan, Selasa (30/1).

DPR, menurut Lucius, sudah memiliki rekam kinerja yang buruk sepanjang

2023. Hal itu, dilihatnya dari produk legislasi yang dihasilkan DPR pada 2023 hanya lima Undang-Undang (UU).

"Hanya menghasilkan lima dari 37 RUU (Rancangan Undang-Undang) prioritas, nampaknya akan semakin parah di tahun 2024 ini," ujar Lucius.

Jika rapat-rapat anggota DPR masih kosong, maka masa sidang III periode 2023-2024 ini bisa saja dikedepan dengan periode tanpa hasil di

bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

"Tetapi juga masa sidang yang tak ada sidangnya," kata Lucius.

Lantas Lucius pun mengaitkannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang banyak dikritik hanya karena mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pemilu. Lucius melihat bahwa persoalan etika, bukan hanya masalah Presiden saja. ● han

Prabowo akan Tambah Jumlah Penerima Program Makan Siang dan Susu Gratis

JAKARTA (IM) - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto akan merevisi jumlah penerima program makan siang dan susu gratis. Jumlah penerima akan ditambah karena ditemukan ada guru yang kurang gizi di beberapa daerah.

Prabowo mengungkapkan hal ini dalam sambutannya pada acara diskusi "Industri Keuangan dan Pasar Modal dalam Roadmap Menuju Indonesia Emas" yang diselenggarakan relawan Genderang atau Gerakan Ekonomi Nasional Prabowo-Gibran di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Senin (29/1).

"Kami sudah hitung, ini memerlukan makan siang yang bergizi untuk 82,9 juta orang. Tetapi mungkin hitungan ini harus kami perbaiki. Kami sudah coba pilot project di beberapa provinsi, kami coba sudah dilaksanankan, berhasil," kata Prabowo.

"Tapi ada yang kami temukan, di beberapa daerah ternyata tidak hanya anak-anak, gurunya juga kurang gizi," ujar Prabowo.

Menteri Pertahanan (Menhan) itu juga mengungkapkan, banyak guru di Indonesia yang ternyata berpenghasilan sangat rendah. Diketahui, anggaran program makan siang dan susu gratis awalnya sebesar 34 miliar dollar Amerika Serikat per tahun.

"Tapi belum dihitung guru. Kalau dihitung guru, nanti akan naik," kata Prabowo.

Sebelumnya, Burhanuddin Abdullah, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mengatakan, akan ada 82,9 juta warga menerima manfaat makan siang dan susu gratis.

Burhanuddin mengatakan hal ini pada acara peluncuran dan pemaparan rekomendasi

kebijakan umum Prabowo dan Gibran bertema "Cita-cita Penerus Negeri" di Kemang, Jakarta Selatan pada 13 Desember 2023 lalu.

"Anak-anak SD, SMP, SMA ada 44 juta. Anak balita 30 juta, ditambah di pesantren 5 juta, ditambah ibu hamil 3 juta, jadi 82,9 juta. 82,9 juta ini kami coba pikirkan untuk diberikan makan siang dan susu gratis," kata Burhanuddin dalam paparannya.

Burhanuddin lantas memprediksi, dengan jumlah tersebut, biaya yang dibutuhkan senilai Rp 1 triliun per hari.

"Jadi setahun itu (kira-kira) Rp 300 triliun," ujarnya.

Dari program tersebut, Burhanuddin mengungkapkan, dibutuhkan 45.000 dapur yang harus dibangun.

"Bukankah itu lapangan kerja? Pak Prabowo mengatakan pada saya, 'kita rekrut sarjana-sarjana baru,'" katanya. ● han



FOTO: ANT

KUNJUNGAN PUAN MAHARANI DI KLATEN

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) berbincang dengan perajin saat melihat proses pembuatan kerajinan gerabah di Melikan, Wedi, Klaten, Jateng, Selasa (30/1). Dalam kunjungan itu Puan Maharani mendengarkan aspirasi dari para perajin gerabah tradisional dan berharap agar kerajinan tersebut tetap berjalan dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

Di Tegal, Anies Keluhkan soal Izin Kumpulkan Massa Kerap Dipersulit

TEGAL (IM) - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengeluhkan soal izin mengumpulkan massa yang kerap kali dipersulit. Hal itu disampaikan saat berkampanye akbar di Lapangan Pendawa Seimbang, Tegal, Jawa Tengah, Selasa (30/1).

"Kita ini kalau mau bikin kumpul-kumpul, cari lapangan saja susah. Lapangannya ada, izinnya yang susah. Nanti sudah dapat izin, izin sudah dikantongin, ilang dari kantong. Nanti mau pakai tempat tahu-tahu enggak bisa," ujar Anies.

Anies kemudian bertanya pada massa apa yang dibutuhkan oleh Indonesia ke depan karena berbagai persoalan itu.

"Apakah kita biarkan situasi ini? Perlunya apa?" tanya Anies.

"Perubahan," jawab ribuan pendukungnya dan calon wakil presidennya, Muhaimin Iskandar.

Anies kemudian meminta pendukungnya melakukan dua hal saat pencoblosan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang jatuh pada 14 Februari. Pertama, mengajak semua pihak yang memiliki hak pilih untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Kedua, kembali ke TPS untuk mengawasi proses penghitungan suara.

"Awasi penghitungan di tiap TPS. Ini bukan mengamankan (suara) Anies-Muhaimin. Ini mengamankan suara kita semua yang ada di TPS itu. Jangan sampai ada kecurangan. Jangan sampai ada manipulasi," tandasnya. ● mei

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SOECHI GROUP

Dengan ini, Direksi PT Soechi Group, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 16 Februari 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : J. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat

Agenda RUPST : 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Peninjauan atas pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquittal of charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

Bahan-bahan terkait mata acara RUPST tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ini sampai dengan RUPST diselenggarakan.

Mohon kehadirannya tepat waktu.

Pemanggilan ini guna memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 31 Januari 2024

Direksi Perseroan

PT Soechi Group

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SOECHI GROUP

Dengan ini, Direksi PT Soechi Group, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 16 Februari 2024
Waktu : Pukul 16.00 WIB – selesai
Tempat : Sahid Sudirman Center Lantai 51, J. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat

Agenda RUPSLB : 1. Persetujuan atas perubahan ketentuan mengenai klasifikasi saham dalam Perseroan dan perubahan ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan tentang Saham sehubungan dengan perubahan tersebut; 2. Persetujuan atas pembagian dividen final yang diambil dari sebagian laba bersih Perseroan sampai tahun buku 2023; 3. Persetujuan atas penurunan modal Perseroan dan perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal sehubungan dengan penurunan modal tersebut; 4. Persetujuan atas perubahan dan penyediaan ketentuan-ketentuan lainnya dari Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan klasifikasi saham dan penurunan modal Perseroan di atas; dan 5. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Bahan-bahan terkait mata acara RUPSLB tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ini sampai dengan RUPSLB diselenggarakan.

Mohon kehadirannya tepat waktu.

Pemanggilan ini guna memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 31 Januari 2024

Direksi Perseroan

PT Soechi Group

PENGUMUMAN

TELAH HILANG SERTIPIKAT

HAK GUNA BANGUNAN (SHGB)

A/N PT PARAMITRA SEMBADA AGUNG

BLOK/KAV. DD01-06

B. 26141 SURAT UKUR 02007/WANASARI/2017

TERTANGGAL 21 MEI 2018

SELUAS 75 M2 YANG TERLETAH DI DESA

WANASARI KECAMATAN CIBITUNG

KABUPATEN BEKASI